

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA RUANG KOTA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BANDUNG

DARTO

Program Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Padjajaran

Penelitian ini menganalisis pengaruh implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Permasalahannya adalah pemanfaatan ruang di Kota Bandung belum efektif seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dengan keterbatasan ruang kota. Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis melakukan penelitian dengan hipotesis bahwa terdapat pengaruh dari implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif verifikatif. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sensus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada pegawai di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa dimensi variabel implementasi kebijakan tata ruang kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung telah berusaha konsisten dalam memberikan pemaknaan terhadap implementasi kebijakan tata ruang kota, tetapi dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang maka perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap penerapan kebijakan yang ada. Tujuannya adalah agar seluruh komponen sumber daya dan masyarakat dapat bersinergi secara optimal demi tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Keywords : *Kebijakan, Tata Ruang, Efektivitas*

PENDAHULUAN

Perkembangan jumlah penduduk dan intensitas kegiatannya yang semakin tinggi dan kompleks, secara umum memberi pengaruh bagi berbagai kegiatan usaha, baik di perkotaan maupun di pedesaan, seperti dibangunnya perumahan, perdagangan, jasa dan industri. Perkembangan kegiatan usaha ini pada

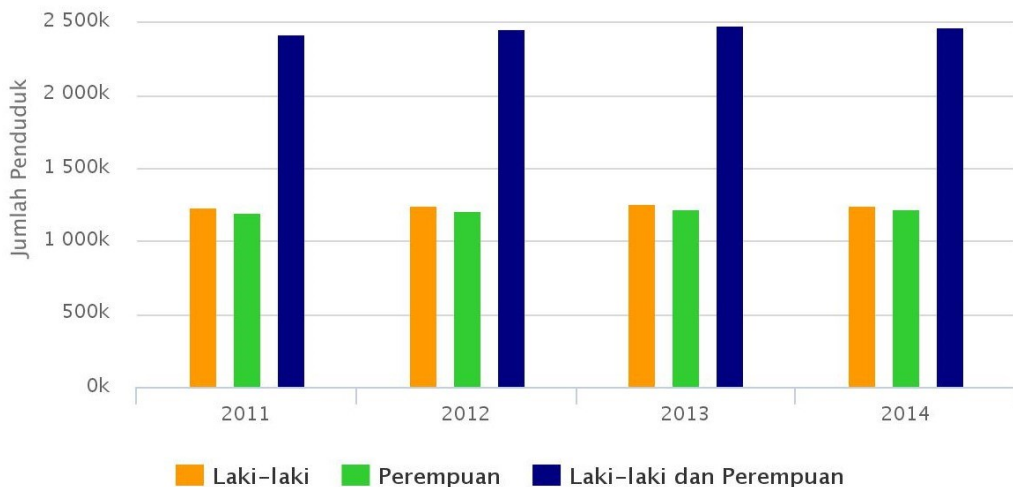
satu sisi cenderung akan memberi dampak pada peningkatan kebutuhan ruang, prasarana, dan sarana sehingga dibutuhkan suatu usaha penanganan penyediaan ruang dan penyediaan prasarana dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Hal ini terutama dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produktivitas. Di sisi lain, perkembangan kegiatan usaha

tersebut menghadapi keterbatasan penyediaan lahan/ruang khususnya perkotaan. Kenyataan yang berkembang menunjukkan bahwa kota-kota di Indonesia cenderung melebar pada kawasan-kawasan dengan kesuburan tanah yang tinggi. Perluasan wilayah perkotaan akan berpengaruh kepada produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, dimana kondisi tersebut membutuhkan suatu usaha untuk lebih mengefisienkan

pemanfaatan ruang dengan program yang jelas.

Jumlah penduduk Kota Bandung dari tahun ke tahun selalu meningkat. Berdasarkan data rekapitulasi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, jumlah penduduk Kota Bandung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2011 - 2014



Sumber : BPS Kota Bandung

Kecenderungan berkembangnya jumlah penduduk dan kegiatannya serta keterbatasan lahan, menurut Supriyanto (1996 : 121), mengakibatkan timbulnya kompetisi antar kegiatan usaha dan antar penduduk dalam memperoleh lahan. Analisis Supriyanto tersebut mengindikasikan bahwa dalam antisipasi perkembangan kehidupan sektor masyarakat dan sektor usaha diperlukan upaya penataan dalam pengelolaan lahan. Penataan lahan atau sering disebut penataan ruang dalam merespon perkembangan kompleksitas fungsi ruang

perkotaan dan pedesaan.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, menurut Supriyanto (1996 : 98 - 99) ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya penataan ruang dalam pembangunan nasional dan daerah, yaitu :

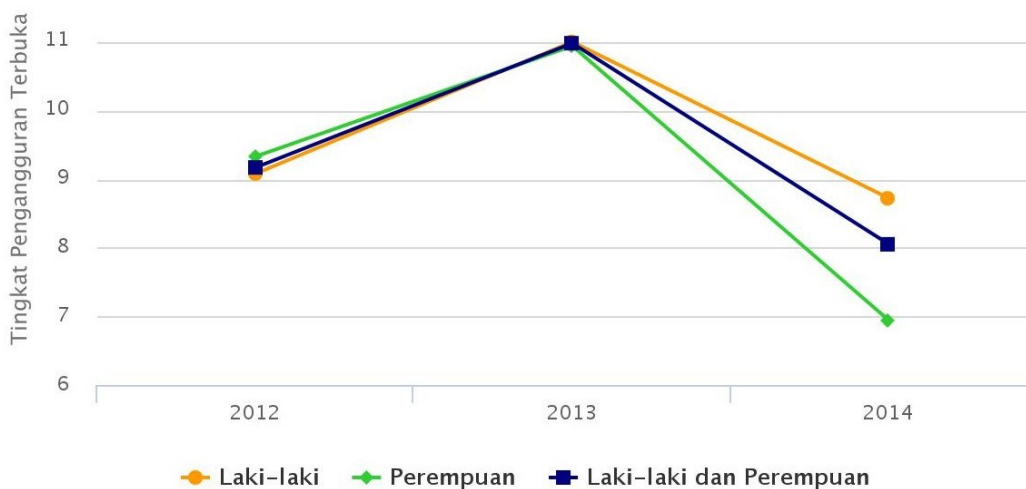
Pertama, sebagai salah satu alat yang paling efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya pemborosan dana dan tenaga yang tersedia. *Kedua*, sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan

nasional/daerah. *Ketiga*, dapat menghindari kesalahpahaman antara pelaku pembangunan dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional/daerah. *Keempat*, arahan bagi pembangunan nasional/daerah, akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih, pemborosan pemanfaatan lahan dan juga menghindarkan adanya penggusuran dan spekulasi tanah. *Kelima*, dengan adanya tata ruang akan terciptanya suatu penggunaan lahan yang jelas, sehingga memudahkan pelaksanaan pembangunan. *Keenam*, dapat menterpadukan program pembangunan nasional dan regional. *Ketujuh*, dapat mewujudkan pengelolaan perkotaan, pedesaan, dan kawasan yang efisien serta lingkungan yang sehat, rapi, aman, dan nyaman. *Kedelapan*, dapat mengurangi kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat khususnya di

kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan sebagainya. *Kesembilan*, dapat meningkatkan motivasi dan dorongan untuk tumbuh dan berkembangnya aspirasi dan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan tata ruang.

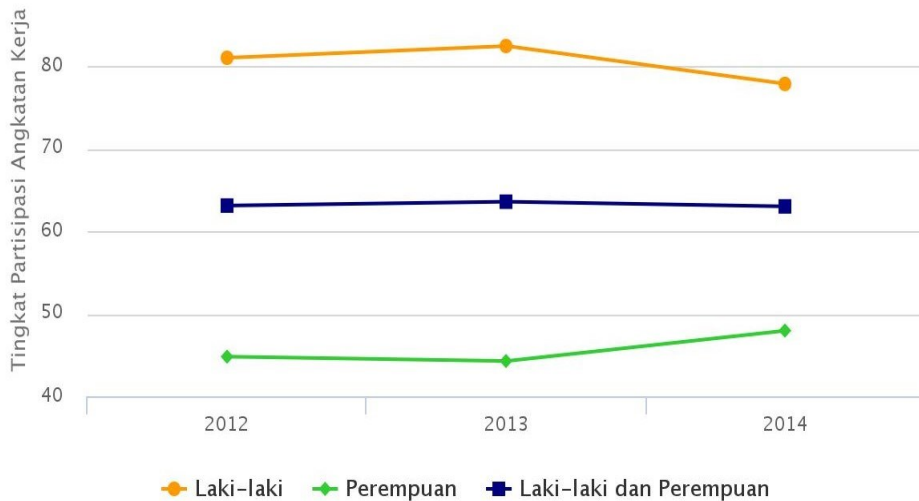
Penataan ruang atau konsep tata ruang secara umum memiliki korelasi dengan pembangunan nasional dan daerah serta secara khusus konsep tata ruang berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan ruang yang tepat, efektif dan efisien tersebut bisa meminimalisir jumlah pengangguran sebagai dampak terus bertambahnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan. Di Kota Bandung perkembangan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 2. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandung 2012 - 2014



Sumber : BPS Kota Bandung

Grafik 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bandung 2012 - 2014



Sumber : BPS Kota Bandung

Masalah yang cenderung berkembang dewasa ini adalah bahwa proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Ketentuan yang mengatur penataan ruang di Kota Bandung, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung belum sepenuhnya diterapkan dengan baik.

Penyusunan rencana tata ruang belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. Di satu sisi, rencana yang disusun belum merupakan hasil kesepakatan dari semua sektor yang terkait dalam pembangunan, dalam arti bahwa dalam penyusunannya kurang banyak melibatkan sektor-sektor terkait. Dengan demikian, sektor tersebut tidak memiliki keterkaitan untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang. Kecenderungan menunjukkan bahwa aspek-aspek tata ruang lebih ditujukan untuk kepentingan sektor pemerintah dan masih kurang

mengakomodasi pada opini dan rencana pembangunan dari sektor swasta dan masyarakat, serta rencana yang disusun belum menunjukkan keterpaduan dalam perencanaan, pembiayaan ataupun pengelolaan dalam program-program yang diusulkan.

Di sisi lain, rencana tata ruang, secara umum belum secara tegas diimplementasikan di lapangan. Ketentuan yang mengatur penggunaan atau pemanfaatan lahan atau ruang kota, pada kondisi dan situasi tertentu seringkali cenderung hanya formalitas kebijakan pemerintah dalam mengatur pengelolaan ruang kota, padahal pengaturan atau penataan tersebut memiliki makna yang signifikan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat dan sektor usaha melalui pemanfaatan ruang secara aman, serasi, nyaman dan teratur.

Perkembangan kegiatan dan kebutuhan masyarakat, antara lain telah memberi dampak negatif yaitu dorongan untuk

pemanfaatan bahkan penyerobotan lahan atau ruang yang ada, walaupun pemanfaatan atau penyerobotan tersebut melanggar ketentuan tata ruang kota. Hal tersebut antara lain diindikasikan oleh adanya pembangunan wilayah kawasan industri dan pemukiman skala menengah dan besar oleh pengusaha yang telah mendapat lisensi dari pemerintah, di kawasan yang sebenarnya lebih layak dan pantas untuk pengembangan sektor pertanian, adanya pembangunan kawasan perkantoran dan usaha di areal yang sebenarnya adalah wilayah pemukiman dan pariwisata masyarakat.

Di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan, terjadi pula pelanggaran rencana tata ruang kota dalam bentuk kegiatan penjualan barang-barang konsumsi masyarakat di areal depan pertokoan, perkantoran atau di tepi jalan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, yang telah menciptakan kesemrawutan dan halangan bagi para pejalan kaki dan pemilik kendaraan bermotor yang melewati wilayah depan pertokoan dan perkantoran tersebut. Perilaku pedagang kaki lima tersebut, bukan hanya telah menimbulkan kemacetan bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, tetapi juga menciptakan ketidakindahan dalam pandangan, karena cenderung kacau balau dan tidak teratur. Pelanggaran dalam penggunaan ruang oleh pedagang kaki lima, pada kota-kota besar tertentu seperti Bandung, telah menjadi pemicu timbulnya masalah dan konflik pada tingkat yang lebih luas antara aparat pemerintah dengan masyarakat. Tindakan pemerintah yang menggusur pedagang kaki lima, telah memicu ketidakpuasan dan kemarahan pedagang, yang pada akhirnya ketidakpuasan dan kemarahan tersebut merangsang perilaku destruktif seperti pembakaran toko dan kendaraan bermotor. Alasan pedagang karena mereka ditarik retribusi pasar oleh aparat pemerintah.

Kondisi dan masalah tersebut, menunjukkan adanya ketidaktegasan dan

standar ganda pemerintah dalam menerapkan peraturan rencana tata ruang, sehingga menimbulkan konflik horizontal dan vertikal yang seringkali memakan korban jiwa dan materi yang cukup besar.

Dari permasalahan tersebut bila dipetakan ke dalam kerangka teori implementasi kebijakan bisa dilihat dari tiga pilar implementasi kebijakan dari Jones (1991 : 296) yaitu : organisasi, interpretasi, dan penerapan. Sehingga penulis mengungkap bahwa pemerintah sebagai organisasi publik yang dalam hal ini adalah organisasi yang berwenang untuk melakukan implementasi kebijakan tata ruang kota terlihat masih lemah baik dari struktur, sumber daya, maupun budaya organisasinya. Dalam penerapan pun ketidakjelasan sering terjadi, hal ini bisa kita amati dari seringnya ketidakkonsistenan penerapan kebijakan misalnya penyalahgunaan fungsi lahan ataupun pembebasan PKL (Pedagang Kaki Lima) di tujuh titik terlarang yang hanya ramai ketika saat Idul Fitri saja. Tidak hanya itu dari segi interpretasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sudah banyak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda bahkan muncul wacana yang sangat santer akhir-akhir ini adalah merevisi Perda tersebut. Tetapi bagaimanapun pemerintah daerah sebagai organisasi pelaksana kebijakan mempunyai andil yang paling pokok untuk terselenggaranya secara efektif kebijakan tata ruang kota.

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya penataan ruang secara efektif dalam rangka mewujudkan kota yang tertib dan kondusif bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya masalah penerapan kebijakan rencana tata ruang serta untuk meminimalisir konflik antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, diperlukan suatu gerak langkah yang terpadu antara berbagai pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut.

DESAIN PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif merupakan kegiatan penelitian yang bermaksud menggambarkan sifat suatu fenomena yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan, serta untuk memeriksa gejala-gejala yang muncul, sebagaimana dikemukakan oleh Whitney yang dikutip Nazir :

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif (Nazir, 1999 : 63 – 64).

Berdasarkan definisi tersebut, penelitian deskriptif sebenarnya hanya ditujukan untuk memperoleh gambaran atas suatu kejadian tanpa harus menyelidiki lebih lanjut tentang sebab dan hubungan yang terjadi antar variabel dalam kejadian yang diteliti. Sedangkan penelitian verifikatif ditujukan untuk menguji kebenaran hipotesis melalui pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh di lapangan dalam konteks implementasi kebijakan rencana tata ruang dan pengaruhnya terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Selanjutnya penelitian menggunakan wawancara, kuisioner, dan juga observasi guna memperoleh data lebih lengkap dan proporsional sehingga data dapat ditampilkan secara ilmiah.

Disamping itu, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2001 : 7)

bahwa, “jenis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua hal utama yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Pada suatu proses penelitian sering hanya terdapat satu jenis data yaitu kuantitatif atau kualitatif saja, tetapi mungkin juga gabungan keduanya.” Maka berdasarkan data yang akan digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan yakni dengan menggunakan data kuantitatif, sebab data yang digunakan merupakan hasil dari skala pengukuran dari hasil jawaban responden pada kuesioner. Namun data kualitatif juga digunakan sebagai data pendukung dari hasil data kuantitatif yang telah diperoleh.

Sehingga penggunaan analisis kuantitatif merupakan cara yang sesuai untuk menyelesaikan pembahasan serta menganalisis hasil penelitian yang penulis lakukan. Serta pertimbangan penulis untuk menggunakan metode kuantitatif yakni dari segi biaya, tenaga dan waktu untuk menyelesaikan penulisan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Populasi yang menjadi sasaran dalam penelitian ini yang sekaligus menjadi sumber data adalah pegawai di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung sebagai pelaksana dari kebijakan Rencana Tata Ruang Kota Bandung yang berjumlah 134 orang.

Dengan pertimbangan dari populasi yang ada maka peneliti akan mengambil seluruh anggota populasi untuk dijadikan responden, atau dengan menggunakan sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan responden. (Sugiyono, 1997 : 62). Dengan demikian maka jumlah respondennya adalah 134 orang.

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh dan berimbang, maka di samping itu juga penulis melakukan *cross check* melalui observasi dan dialog dengan masyarakat secara aksidental sampling.

OPERASIONALISASI VARIABEL

Operasional variabel yang diajukan terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*).

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan mengenai kebijakan tata ruang di Kota Bandung. Implementasi kebijakan

memiliki beberapa sub variabel/dimensi yaitu : organisasi, interpretasi, dan penerapan.

2. Variabel terikat, yaitu efektivitas dalam hal pemanfaatan ruang di Kota Bandung. Sub variabel/dimensi dari efektivitas ini adalah tujuan dan dampak.

Untuk lebih jelasnya operasionalisasi variabel dapat diuraikan seperti dalam tabel berikut :

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Bebas dan Terikat

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan	1. Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan struktur organisasi penyelenggara 2. Kelembagaan yang ada dapat menyesuaikan dengan visi dan misi kota Bandung 3. Kompleksitas satuan unit kerja organisasi pelaksana kebijakan 4. Budaya kerja organisasi dapat mendukung implementasi kebijakan tata ruang 5. Kuantitas implementor kebijakan tata ruang yang memadai 6. Profesionalisme pelaksana kebijakan 7. Dukungan finansial 8. Sarana yang memadai
	2. Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan yang jelas yang ingin dicapai dari kebijakan tata ruang 2. Pemahaman terhadap kebijakan 3. Tingkat kompleksitas Perda 4. Kebijakan tata ruang memiliki rincian petunjuk yang jelas 5. Akurasi data tata kota Bandung

	3. Penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi yang berkesinambungan 2. Kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku 3. Kebijakan tata ruang yang operasional (<i>applicable</i>) 4. Ruang lingkup tugas implementor yang jelas 5. Pertanggungjawaban yang jelas 6. Loyalitas implementor dalam melaksanakan tugas 7. Mengutamakan kepentingan umum 8. Adanya media dialogis yang partisipatif 9. Pemilihan implementor sesuai dengan kualifikasi 10. Sesuai tugas dengan kemampuan implementor 11. Prosedur operasional kebijakan memiliki dukungan berbagai pihak 12. Pembagian tugas antar bidang yang terkait dengan kebijakan 13. Koordinasi antar bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan
Efektivitas	1. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya tujuan kebijakan sesuai dengan waktu yang ditentukan 2. Pemanfaatan ruang kota sesuai dengan tujuan kebijakan 3. Prioritas program 4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
	2. Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertiban kota 2. Keindahan kota 3. Kemajuan sektor ekonomi 4. Stabilitas sosial 5. Keseimbangan ekosistem

ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan dengan berpedoman kepada operasionalisasi variabel, dimensi dan indikator. Dengan format jawaban kuesioner menggunakan Skala Likert, dimana Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2001 : 73). Skala Likert yang digunakan terdiri dari 5 kategori : sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Alternatif jawaban tertinggi diberi skor 5 dan yang terendah diberi skor 1. hal ini akan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Skala Likert untuk Alternatif Jawaban Responden

Alternatif Jawaban	Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Data primer yang dihasilkan dari hasil wawancara dengan informan dianalisis secara bersamaan dari mulai deduksi data, penyajian data dan penulisan kesimpulan (Milles and Huberman, 1984). Data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner diolah secara kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik parametrik melalui analisis jalur. Sebelumnya data hasil penelitian tersebut akan diuji validitas,

reliabilitas dan *internal consistency*-nya yang kemudian diubah skalanya menjadi interval melalui metode *Successive Interval*. Berdasarkan permasalahan penelitian yang akan dianalisis yakni ingin diketahui pengaruh sub-sub variabel Implementasi Kebijakan Tata Ruang (X_1 , X_2 , X_3) terhadap variabel Efektivitas Pemanfaatan Ruang (Y).

PEMBAHASAN

Dalam sub bagian ini akan dipaparkan mengenai bagaimana sebenarnya tanggapan responden mengenai masing-masing variabel penelitian, yakni subvariabel X_1 (organisasi), subvariabel X_2 (interpretasi), dan subvariabel X_3 (penerapan) terhadap variabel Y (efektivitas dalam hal pemanfaatan ruang). Adapun tanggapan tersebut menggambarkan berupa jawaban atau gambaran penilaian

responden terhadap situasi ataupun kondisi yang telah maupun sedang terjadi, adapun dalam sub bagian dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut pada penulisan berikut ini, yang disertai dengan tabel agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggapan responden terhadap penelitian yang dilakukan.

Maka untuk mengetahui tanggapan responden mengenai subvariabel X_1 yaitu organisasi, untuk itu tanggapan responden tersebut akan dibahas secara satu persatu pada masing-masing subvariabel agar dapat diketahui dengan secara pasti bagaimana tanggapan responden yang ada, sehingga untuk mengetahui tanggapan responden mengenai subvariabel X_1 yaitu organisasi, dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rekapitulasinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Subvariabel X_1 (Organisasi)

Variabel	Item	Frekuensi Kategori Tanggapan Responden					Total
		1	2	3	4	5	
Subvariabel X_1 (Organisasi)	P-1	0	16	43	62	13	134
	P-2	0	10	45	64	15	134
	P-3	2	5	50	66	11	134
	P-4	0	18	62	41	13	134
	P-5	1	26	48	35	24	134
	P-6	2	22	29	57	24	134
	P-7	2	16	36	60	20	134
	P-8	1	19	35	53	26	134

Sumber : Hasil data yang telah diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sub variabel X_1 (organisasi) dalam implementasi kebijakan tata ruang Kota Bandung lebih banyak memberikan tanggapan setuju, ragu-ragu, dan sangat setuju.

Namun dari beberapa hasil tanggapan responden tersebut lebih banyak tanggapan yang diberikan oleh responden penelitian bahwa aspek organisasi dalam implementasi kebijakan tata ruang kota

Kota Bandung adalah setuju. Sehingga secara umum dari tanggapan responden yang ada terhadap seluruh pertanyaan dari tiap dimensi subvariabel X_1 (organisasi) menunjukkan nilai baik.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai subvariabel X_2 yaitu interpretasi, dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rekapitulasinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Subvariabel X_2 (Interpretasi)

Variabel	Item	Frekuensi Kategori Tanggapan Responden					Total
		1	2	3	4	5	
Subvariabel X_2 (Interpretasi)	P-9	1	12	40	58	23	134
	P-10	2	17	49	52	14	134
	P-11	5	21	34	51	23	134
	P-12	3	18	30	61	22	134
	P-13	2	20	43	44	25	134

Sumber : Hasil data yang telah diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sub variabel X_2 (interpretasi) dalam implementasi kebijakan tata ruang kota Kota Bandung lebih banyak memberikan tanggapan setuju, ragu-ragu, dan sangat setuju.

Namun dari beberapa hasil tanggapan responden tersebut lebih banyak tanggapan yang diberikan oleh responden penelitian bahwa aspek interpretasi dalam implementasi kebijakan tata ruang kota

Kota Bandung adalah setuju. Sehingga secara umum dari tanggapan responden yang ada terhadap seluruh pertanyaan dari tiap dimensi subvariabel X_2 (interpretasi) menunjukkan nilai baik.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai subvariabel X_3 yaitu penerapan, dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rekapitulasinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Subvariabel X_3 (Penerapan)

Variabel	Item	Frekuensi Kategori Tanggapan Responden					Total
		1	2	3	4	5	
Subvariabel X_3 (Penerapan)	P-14	3	25	37	43	26	134
	P-15	5	20	33	66	10	134
	P-16	0	16	50	56	12	134
	P-17	0	20	38	64	12	134
	P-18	2	18	40	53	21	134
	P-19	1	13	43	55	22	134
	P-20	0	12	37	58	27	134
	P-21	1	15	22	63	33	134
	P-22	1	14	32	53	34	134
	P-23	0	9	29	59	37	134
	P-24	0	16	39	61	18	134
	P-25	0	10	42	62	20	134
	P-26	2	5	49	63	15	134

Sumber : Hasil data yang telah diolah

Tabel rekapitulasi frekuensi jawaban responden tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa tanggapan responden terhadap subvariabel X_3 (penerapan) dalam implementasi kebijakan tata ruang kota Kota Bandung lebih banyak memberikan tanggapan setuju, ragu-ragu, dan sangat setuju.

Tetapi dari beberapa hasil tanggapan responden tersebut sangat jelas lebih banyak tanggapan yang diberikan oleh responden penelitian tentang aspek penerapan dalam implementasi kebijakan

tata ruang kota Kota Bandung adalah setuju. Sehingga secara umum dari tanggapan responden yang ada terhadap seluruh pertanyaan dari tiap dimensi subvariabel X_3 (penerapan) menunjukkan nilai baik.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden mengenai variabel Y yaitu efektifitas pemanfaatan ruang, dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang rekapitulasinya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 6. Rekapitulasi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y (Efektifitas Pemanfaatan Ruang)

Variabel	Item	Frekuensi Kategori Tanggapan Responden					Total
		1	2	3	4	5	
Variabel Y (Efektivitas Pemanfaatan Ruang)	P-27	0	18	61	37	18	134
	P-28	1	26	45	36	26	134
	P-29	2	22	29	61	20	134
	P-30	2	16	44	55	17	134
	P-31	1	19	38	49	27	134
	P-32	1	12	48	59	14	134
	P-33	2	17	52	50	13	134
	P-34	5	21	31	54	23	134
	P-35	3	18	33	56	24	134

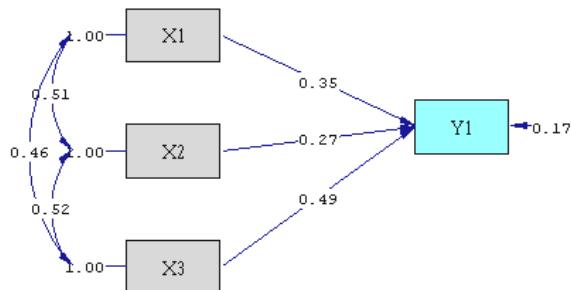
Sumber : Hasil data yang telah diolah

Frekuensi jawaban pada tabel di atas mengenai tanggapan responden terhadap efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung bervariasi yaitu mulai dari setuju, ragu-ragu, dan sangat setuju.

Namun dari variasi jawaban tersebut secara umum tanggapan responden terhadap efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung lebih didominasi oleh jawaban setuju. Ini artinya bahwa tanggapan responden terhadap seluruh pertanyaan

dari tiap dimensi variabel Y (efektivitas pemanfaatan ruang) menunjukkan nilai baik.

Pengaruh implementasi kebijakan tata ruang kota terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung, berikut gambar diagram jalur pengaruh implementasi kebijakan tata ruang kota (organisasi, interpretasi, penerapan) terhadap efektivitas pemanfaatan ruang di Kota Bandung.



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Gambar 1. Diagram Jalur Antar Variabel

Berdasarkan gambar diagram jalur di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara langsung subvariabel X_1 terhadap Y sebesar $0.35 \times 0.35 \times 100 \% = 12,48 \%$, sehingga dapat disimpulkan belum terlihat secara signifikan, sedangkan pengaruh secara langsung subvariabel X_2 terhadap Y sebesar $0.27 \times 0.27 \times 100 \% = 7,09 \%$, dan pengaruh secara langsung subvariabel X_3 terhadap Y sebesar $0.49 \times 0.49 \times 100 \% = 24,27 \%$. Di lain pihak faktor lain yang mempengaruhi terhadap variabel Y yakni sebesar $0.17 \times 0.17 \times 100 \% = 2,89 \%$. Pengaruh untuk variabel gabungan X_1, X_2 , dan X_3 terhadap Y sebesar 0.8458 atau $84,58 \%$, yang tidak lain adalah besarnya koefisien determinasi $R^2_{y(x_1x_2x_3)}$ yaitu 0.8458 .

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis data, dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

- Implementasi kebijakan tata ruang kota yang menyangkut dimensi organisasi, interpretasi dan penerapan kebijakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung. Melalui serangkaian uji F untuk model umum dan uji t untuk koefisien jalur, akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tata ruang kota mempengaruhi efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung.
- Berdasarkan koefisien-koefisien jalur dapat ditentukan bahwa secara parsial implementasi kebijakan tata ruang kota yang memiliki dimensi-dimensi berupa penerapan kebijakan memiliki efek langsung terbesar terhadap efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung, diikuti oleh organisasi dan interpretasi. Tingkat variasi nilai pengaruh masing-masing dimensi, dapat dijelaskan dari kondisi objektif di lapangan. Dimensi

penerapan menunjukkan dimensi yang paling dominan dalam implementasi kebijakan tata ruang kota. Hal ini menunjukkan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan dimensi penerapan seperti instruksi yang berkesinambungan, kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, kebijakan tata ruang yang operasional (*applicable*), ruang lingkup tugas implementor yang jelas, pertanggungjawaban yang jelas, loyalitas implementor dalam melaksanakan tugas, mengutamakan kepentingan umum, adanya media dialogis yang partisipatif, pemilihan implementor sesuai dengan kualifikasi, sesuai tugas dengan kemampuan implementor, prosedur operasional kebijakan memiliki dukungan berbagai pihak, pembagian tugas antar bidang yang terkait dengan kebijakan, koordinasi antar bidang terkait dalam pelaksanaan kebijakan telah mampu berjalan dengan baik dan mampu mengoptimalkan efektivitas pemanfaatan ruang Kota Bandung. Pengaruh terkecil diperoleh dari dimensi interpretasi. Secara objektif di lapangan kondisi ini menunjukkan masih banyaknya aspek-aspek yang harus dibenahi oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung terutama berkaitan dengan tingkat kompleksitas perda yang perlu disederhanakan dan keakuratan data tata kota yang tepat.

2. Saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Dalam implementasi kebijakan dibutuhkan organisasi pelaksana yang kuat dan konsisten dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karenanya pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) di bawah koordinasi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya harus difungsikan secara optimal bukan hanya sekedar formalitas dan hanya

- menimbulkan inefisiensi sumber daya.
- b. Dari segi interpretasi perda harus dipahami secara mendalam dan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Oleh karenanya perlu dibuka media dialogis untuk menggali informasi / data yang akurat supaya tidak terjadi multi tafsir terhadap kebijakan tata ruang.
 - c. Penegakkan hukum atas peraturan yang ada. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dijadikan landasan hukum dalam penataan dan pengembangan kawasan lindung atau hutan kota setidaknya untuk lima tahun mendatang, namun mungkin yang belum dirasakan maksimal adalah pelaksanaan dan upaya penegakan hukumnya. Pemberian sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan lahan di luar peruntukannya harus lebih tegas, terlebih di kawasan yang telah diatur dalam peraturan tersebut misalnya untuk wilayah Bandung Utara dan Bandung Barat.
 - d. Di bagian utara Kota Bandung khususnya pada kawasan seperti Puncut, Babakan Siliwangi dan lain-lain yang berfungsi sebagai kawasan lindung atau yang dapat memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mutlak harus diselamatkan dan dipertahankan fungsinya. Kawasan ini sangat penting sebagai daerah ruang terbuka hijau, penyangga banjir dan manfaat ekosistem lingkungan lainnya
 - e. Perlu diidentifikasi juga berbagai lahan pada bagian-bagian kota yang strategis untuk dijadikan hutan kota. Seperti di perempatan Jl. Buah Batu dengan Jl. Soekarno Hatta, Jl. Terusan Kiaracandong dan Jl. Soekarno Hatta, dan lahan-lahan di kawasan pemukiman penduduk atau kompleks-kompleks perumahan, serta lahan di ruas-ruas jalan raya.
 - f. Untuk mendorong pengembangan pusat primer Gedebage, pengembangan pusat sekunder Sadang Serang, Setrasari dan Arcamanik perlu segera dibentuk manajemen kawasan yang khusus menangani masalah pengembangan daerah tersebut. Sehingga permasalahan integrasi program, perencanaan dan biaya pembangunan, hingga regulasi yang diperlukan relatif akan lebih mudah dicarikan solusinya. Salah satu pola yang disarankan adalah pola LDC (*Land Development Corporation*), pola ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Dalam pola LDC lahan yang diperlukan untuk pengembangan, tak harus selalu dibeli pemerintah kota, karena semua pemilik lahan akan menjadi bagian utama dalam manajemen kawasan. Artinya pemerintah kota dan para profesional termasuk investor merumuskan bagaimana cara mengembangkan kawasan tersebut.
 - g. Perlu peran serta masyarakat dan pelibatan seluruh *stakeholders* secara nyata. Yaitu partisipasi dari kalangan dunia usaha, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan hukum dan ahli-ahli dari perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian yang ada di Kota Bandung. Sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan pihak *stakeholders* menjadi sangat penting agar kesadaran dan kepedulian serta peran serta nyata mereka secara terorganisasi lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku-buku**

- Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Al-Rasjid, Harun. 1994. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung : Program Pascasarjana Unpad.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest and Institutions : The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York : Brasil Blackwell Ltd.
- Daft, Richard L. 1992. *Organization Theory and Design*. Fourth Edition. Singapore : West Publishing Company.
- Denhardt, Janet V., & Roberth B. Denhardt. 2003. *The New Public Service*. New York : M. E. Sharpe.
- Dimock, Marshal E., & Gladys Ogden Dimock. 1984. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta : Aksara Baru.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A., Partini, Ratminto. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Dye, T. R. 1983. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Edwards III, G.C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington : Congressional Quarterly Press.
- Frederickson, H.G. 1984. *Administrasi Negara Baru*. Terjemahan Al-Ghozi Usman. Jakarta : LP3ES.
- Goggin, M.L., Ann O'M Bowman, James P. Lester, & Laurence J. O'Toole, Jr. 1990. *Implementation Theory and Practice : Toward a Third Generation*. London : Scott, Foresman and Company.
- Golembiewsky, R.T., Frank Gibson, & Geoffrey J. Cornog (Eds). 1976. *Public Administration*. Chicago : Rand Mc Nally CollegePublishing Company.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Haeruman, Herman. 1999. *Sistem Kota-kota dan Penataan Ruang dalam Pengelolaan Fungsi Kota*. Buletin Tata Ruang. Jakarta : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.
- Hall, R.H., and Robert E. Quinn (Eds). 1983. *Organizational Theory and Public Policy*. California : Sage Publications, Inc.
- Handyaningrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hesselbein, F., Marshal Goldsmith, Richard Beckhard (Eds.). 1997. *The Organization of The Future*. San Fransisco : Jossey – Bass Publishers.

- Hodge, B.J., William P. Anthony, & Lawrence M. Gales. 1996. *Organization Theory : A Strategic Approach*. Fifth Edition. London : Harvester Wheatsheap.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Terjemahan R.L.L. Tobing. Jakarta : Erlangga.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Jakarta : Rajawali.
- Jones, G.R. 1995. *Organizational Theory : Text and Case*. New York : Addison Wesley Publishing Company.
- Lemay, M. E. 2002. *Public Administration*. Canada : Thomson Learning.
- Mintberg, H. 1979. *The Structuring of Organization : A Synthesis of The Research*. Tokyo : Prentice-Hall of Japan, Inc.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nugroho D., Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Pfiffner, J.M. & Robert Presthus. 1967. *Public Administration*. New York : The Ronald Press Company.
- Pressman, J.L., & Aaron Wildavsky. 1973. *Implementation : How Great Expectation in Washington are Dased in Oakland*. London : California Press.
- Redford, E.S. 1975. *Ideal and Practice in Public Administration*. America : University of Alabama Press.
- Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago : The Dorsey Press.
- Robbins, S. P. 1990. *Organization Theory : Structure, Design, and Applications*. New Jersey : Prentice-Hall International, Inc.
- Saefullah, A. D. 1996. *Etika Jabatan Publik*. Bandung : LAN.
- Santoso, Amir. 1987. *Analisis Kebijaksanaan Publik : Suatu Pengantar*. Jurnal Ilmu Politik 3 : 3 - 13. Jakarta : PT. Gramedia.
- Schermerhorn, J.R., James G. Hunt, & Richard N. Osborn. 1994. *Managing Organization Behavior*. New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Sharkansky, I. 1975. *Public Administration : Policy-Making in Government Agencies*. Third Edition. Chicago : College Publishing Company.
- Siagian, Sondang P. 1997. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta : PPM.
- Smith, S.L.J. 1989. *Tourism Analysis A Handbook*. England : Longman Scientific and Technical.
- Stoner, James A. F. And R. Edward Freeman. 1989. *Management* (Fourth Edicition). New Jersey : Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Sugandha, D. 1989. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta : Intermedia.
- Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Supriyanto, Budi. 1996. *Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional : Suatu Strategi dan Pemikiran*. Jakarta : Lembaga Strategi Pengembangan Ilmu.
- Tamim, F. 2004. *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur*. Jakarta : Balantika.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, B.1974. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta : LP3ES.
- Tjokrowinoto, M. 1996. *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.
- Wheelen, T.L., & J. David Hunger. 1992. *Strategic Management and Business Policy*. New York : Addison Wasley Publishing Company.

2. Dokumen dan Publikasi

- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.
- Santosa, Pandji. 2006. *Pengaruh Pengendalian dan Koordinasi terhadap Efektivitas Penggunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Sulandri, Titiek. 2003. *Proses Evaluasi IUUG dalam Pemberian Ijin Factory Outlet*. Tesis, Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung.
- Tachjan. 2005. *Pengaruh Kapasitas Organisasi Pembina dan Kualitas Program Pembinaan Usaha Jasa Akomodasi terhadap Kewirausahaan Pengusaha dalam Penyerapan Tenaga Kerja dari Masyarakat Setempat*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

